



## Supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of Infrastructure Development in Ilangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency

Salma Hulinggi<sup>1\*</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Tety Thalib<sup>3</sup>  
Universitas Bina Taruna Gorontalo

**Corresponding Author:** Salma Hulinggi [salmahulinggi035@gmail.com](mailto:salmahulinggi035@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Monitoring,  
Implementation,  
Infrastructure Development

*Received :* 20 November

*Revised :* 23 December

*Accepted:* 20 January

©2023 Hulinggi, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to determine the Supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of Infrastructure in Ilangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency. This research consists of three focuses, namely Preliminary Supervision (Preliminary), Infrastructure Development Monitoring and Feedback Monitoring. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study concluded that the initial structural supervision had not gone well. The supervisory pattern of the BPD with the village head tends to be one-way. Supervision of Infrastructure Development is not yet complete. Oversight of BPD and TPK feedback did not run optimally, so the existing development was not completed. It is suggested that it is necessary to change the initial supervision with a two-way supervision pattern, improve relations with more friendly organizational partners, and coordinate the development of all activities and use good direction.

---

## Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Salma Hulinggi<sup>1\*</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Tety Thalib<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo

**Corresponding Author:** Salma Hulinggi [salmahulinggi035@gmail.com](mailto:salmahulinggi035@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pengawasan, Pelaksanaan, Pembangunan Infrastruktur

*Received :* 20 November

*Revised :* 23 Desember

*Accepted:* 20 Januari

©2023 Hulinggi, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Infrastruktur Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini terdiri dari tiga fokus yakni Pengawasan Awal (Pendahuluan), Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengawasan Umpan balik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pengawasan awal dengan struktural belum berjalan baik. Pola pengawasan BPD dengan Kepala Desa yang cenderung bersifat satu arah. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur pun belum sepenuhnya. Pengawasan umpan balik BPD dan TPK tidak berjalan maksimal olehnya pembangunan yang ada tidak selesai. Disarankan perlunya merubah pengawasan awal dengan pola pengawasan yang bersifat dua arah, meningkatkan hubungan dengan mitra kerja organisasi yang lebih bersahabat, serta mengoordinasikan perkembangan semua kegiatan dan menggunakan pengarahan dengan baik.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara. Kegiatan pembangunan harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilakukan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah sebagai pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, serta melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang terhadap pola hidup masyarakat akan tetapi, pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Target pembangunan desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah : pertama, Pembangunan di bidang sarana dan prasarana (Infrastruktur) Pembangunan di bidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Kedua, Pemberdayaan masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas.

Pemerintah desa merupakan penggerak utama masyarakat desa dalam pembangunan desa, dengan cara memberi arahan dan mengayomi masyarakat desa menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengayomi masyarakat desa agar dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di kawasan pedesaan. Hal ini mencerminkan transparansi dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan

pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM istilah kerennya Human Resource (HR). Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan Daya Manusia termasuk didalamnya ada manajemen sumber daya manusia (MSDM) sehingga semua kegiatan berjalan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan baik diorganisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dibidang masing-masing dalam menjalankan kegiatan disebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia, agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

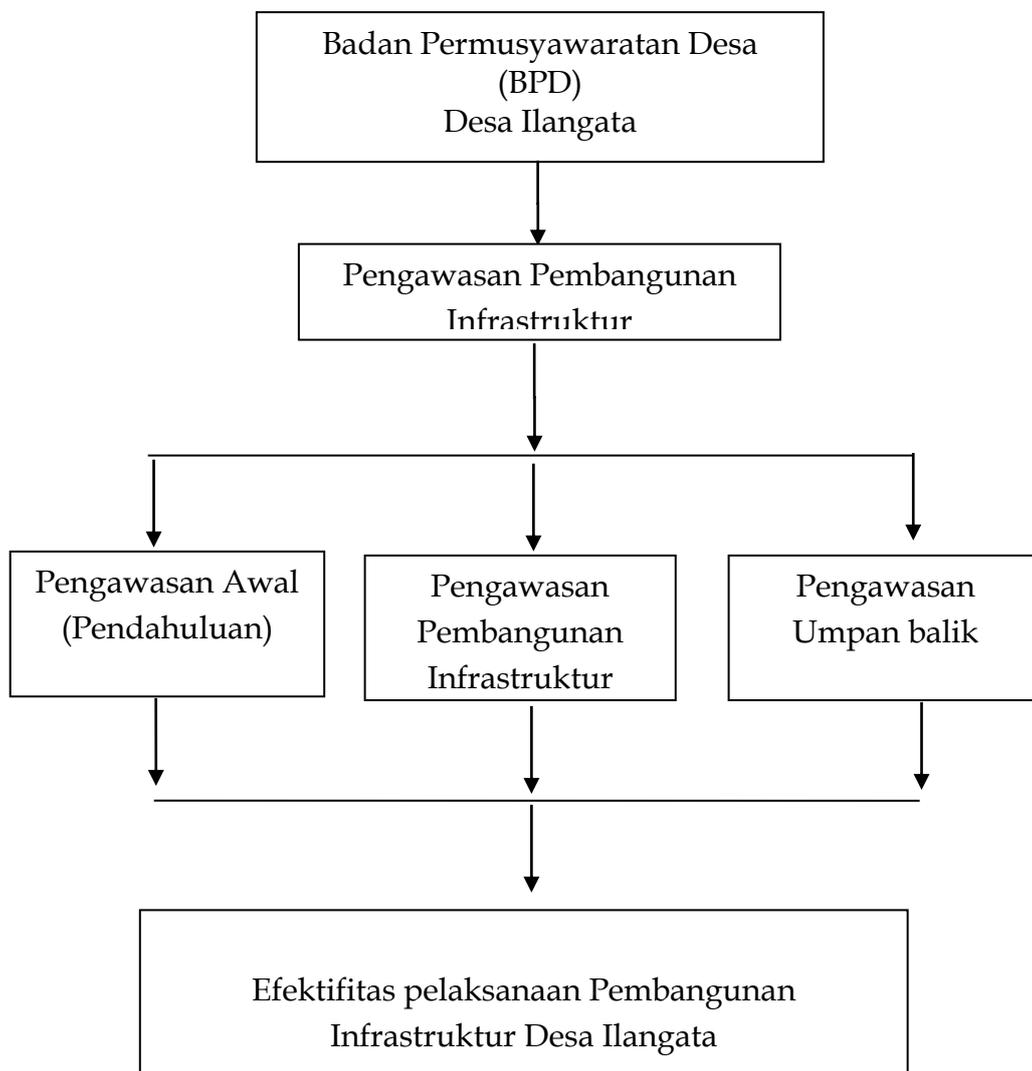
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan mengangkat judul "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara". Dari uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Masih kurangnya pengawasan awal. Masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jamban, mahayani, plat dueker jalan. Masih kurangnya feedback monitoring yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam program pembangunan infrastruktur. Rumusan masalah ini disesuaikan dengan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya yaitu; Bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

## TINJAUAN PUSTAKA

*Malayu S.P. Hasibuan (2012:01)* Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut *Handoko (2012: 8)* manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. *Terry dalam nawawi (2011: 11)* manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara efektif dan efisien. ada empat fungsi manajemen yang banyak di kenal dalam masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (actuating) dan fungsi pengendalian (controlling). Dibawah ini akan dijelaskan arti atau pengertian masing-masing fungsi manajemen POAC (planning, Organizing, actuating, Controlling). *Saefullah (2012:317)* pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. *Herujito (2011:216)* Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah ,tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. *Dessler (2015)* mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses memperoleh dan pemberian kompensasi pada karyawan. Serta untuk mengelola hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan juga hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. *Anna Sedarmayanti* dalam bukunya perencanaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi kinerja dan produktifitas kerja menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pendaya gunaan manusia sebagai tenaga kerja manusiawi agar semua potensi fisik yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. *Kasmir* dalam teorinya menjelaskan MSDM sebagai proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stekholder. *Mazmanian (2014: 68)* pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang , namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting atau pun peradilan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah

yang strategis maupun perasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. *Syafi'ie* secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut: Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.



Gambar 1. Conceptual Framework

## METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:125) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Data dari penelitian deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi (Mudrajat Kuncoro, 2009: 8).

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009: 157). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 410) "wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi" (Irawan Soehartono, 2009:70). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen yang diperlukan.

## HASIL PENELITIAN

### *Langkah langkah penelitian*

1. Pengawasan awal atau pendahuluan  
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) pada tahap awal sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang telah disepakati bersama .
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur  
Yaitu pengawasan oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) pada saat pembangunan infrastuktur sementara berlangsung .
3. Pengawasan umpan balik  
Yaitu pengawasan Badan permusyawaratan desa (BPD) untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan atau pencapaian target
4. Mengolah Sumber Data  
Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah Ketua BPD sebagai informan kunci, pihak pemerintah terkait sebanyak 3 orang, Anggota BPD 2 Orang dan masyarakat Ilangata sebanyak 3 orang. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
  - Observasi  
Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009: 157). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung.

- Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 410) “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi” (Irawan Soehartono, 2009:70). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen yang diperlukan.

6. Keseluruhan proses ini berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

- Reduksi data (*Reduction Data*) : Reduksi data adalah tahap yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan maupun penyajian data, dimana apabila dilihat ada data yang kurang relevan maka akan dilakukan reduksi atau perubahan/penyesuaian data. Biasanya dalam bentuk pengalimatan/penafsiran.

- Penyajian data (*data display*) ; Penyajian data atau display adalah tahapan dimana peneliti memilih bentuk penyajian yang diinginkan, dengan pertimbangan kemudahan penafsiran dan unsur komunikatif.

- Kesimpulan atau Vertivikasi (*Conclusion or Verification*); Kesimpulan /vertiviasi adalah tahapan akhir dimana peneliti telah sampai pada suatu kesimpulan mengenai data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan Awal

Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi sesuai dengan perencanaan dinilai yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting disebuah desa selain sebagai perwakilan rakyat BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan Kepala desa dalam pembuatan peraturan, BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya RAB Desa didalamnya memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang pengololaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

APBDesa dikolola oleh pemerintah desa setiap tahunnya harus tepat sasaran dimana tujuan trasperan dana dari pemerintah pusat penggunaan

Dana desa harus sesuai dengan apa yang telah diusulkan, direncanakan, dan diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat didesa tersebut.

## **2. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur**

Selanjutnya kurangnya pengawasan pada pelaksanaan pembangunan jamban,jalan tani,plat dueker oleh BPD contohnya tidak turun langsung kelapangan. Adapun pengawasan dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan BPD dengan kelembagaan lain yang setingkat dengannya dengan menjabarkan hubungan komunikasi yang baik antara satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lain yaitu bentuk pengawasan BPD dengan pemerintah desa. Dari hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa, pengawasan BPD dengan mitra kerja organisasi untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengawasan yang dibentuk BPD terlalu kaku., tampak jarak yang terlalu lebar antara pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, belum melakukan pengawasan sepenuhnya dalam pengambilan kebijakan, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja dan mempengaruhi produktifitas mitra kerja dalam satu organisasi, sedangkan keseluruhan aspek kegiatan itu harus adanya keterlibatan BPD karena program kegiatan pemerintah desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sejalan dengan pengawasan BPD menurut(Alam, 2019:89)yaitu BPD merupakan mitra perangkat Desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Dari segi kedudukan tersebut, maka sangat diperlukan pengawasan BPD untuk mensukseskan pengelolaan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa.

## **3. Pengawasan Umpan Balik**

Pengawasan umpan balik dikenal juga sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab –sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Kurangnya pengawasan umpan balik yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) contohnya tidak mengevaluasi pemerintah desa .khususnya Tim Pelaksana kegiatan (TPK) apakah pekerjaan yang ada dilapangan sudah selesai atau belum. Badan permusyawaratan Desa (BPD) sekedar sebagai pelengkap untuk melengkapi susunan yang ada.

APBDesa dikolola oleh pemerintah desa setiap tahunnya harus tepat sasaran dimana tujuan trasperan dana dari pemerintah pusat penggunaan Dana desa harus sesuai dengan apa yang telah diusulkan, direncanakan, dan diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat didesa tersebut.

Pengawasan Awal (Pendahuluan) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola pengawasan yang cenderung bersifat satu arah sehingga terjadi *miss comunation* antara keseluruhan struktural dan mempengaruhi produktifitas kerja .

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa sebagai mitra kerja yang ada di didesa Ilangata belum efektif. Hai ini terlihat dari pengawasan yang terlalu kaku, tampak jarak yang terlalu lebar antara BPD dan Kepala Desa serta belum melakukan

pengawasan sepenuhnya dalam pengambilan kebijakan yang telah dilakukan sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja dan mempengaruhi produktifitas mitra kerja organisasi.

Pengawasan umpan balik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini TPK tidak berjalan dengan baik dan tidak maksimal olehnya itu pembangunan yang ada didesa ilangata tidak selesai dan bermasalah, dan dimata masyarakat sudah selesai karena mereka tidak tahu bahwa pekerjaan itu sudah sesuai atau tidak, dengan perencanaan awal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD dengan pemerintah desa ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif. Hal tersebut terlihat dari pola pemerintahan yang bersifat satu arah dan kurang koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal ini TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), tampak jarak yang terlalu lebar antara BPD dengan kepala Desa, belum melakukan pengawasan sepenuhnya dan pengambilan kebijakan yang telah dilakukan terkait pembuatan APBDes, serta kurang mengevaluasi semua perkembangan kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga terjadi kesalahpahaman dalam bekerja dan mempengaruhi produktifitas kerja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka selanjutnya dilakukan penarikan simpulan bahwa : Pengawasan Awal (Pendahuluan) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa Ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola pengawasan yang cenderung bersifat satu arah sehingga terjadi miss comonation antara keseluruhan struktural dan mempengaruhi produktifitas kerja. Selanjutnya; Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa sebagai mitra kerja yang ada di Didesa ilangata belum efektif. Hai ini terlihat dari pengawasan yang terlalu kaku, tampak jarak yang terlalu lebar antara BPD dan Kepala Desa serta belum melakukan pengawasan sepenuhnya dalam pengambilan kebijakan yang telah dilakukan sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja dan mempengaruhi produktifitas mitra kerja organisasi . sementara itu ; Pengawasan umpan balik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini TPK tidak berjalan dengan baik dan tidakmaksimal olehnya itu pembangunan yang ada didesa ilangata tidak selesai dan bermasalah, dan dimata masyarakat sudah selesai karena mereka tidak tahu bahwa pekerjaan itu sudah sesuai atau tidak, dengan perencanaan awal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD dengan pemerintah desa ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif. Hal tersebut terlihat dari pola pemerintahan yang bersifat satu arah dan kurang koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal ini TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), tampak jarak yang terlalu lebar antara BPD dengan kepala Desa, belum melakukan pengawasan sepenuhnya dan pengambilan kebijakan yang telah dilakukan terkait pembuatan APBDes, serta kurang mengevaluasi semua perkembangan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga terjadi kesalahpahaman dalam bekerja dan mempengaruhi produktifitas kerja.

## REKOMENDASI

1. Perlunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ilangata untuk merubah pola pengawasan awal kepada unit yang dipimpinnya dengan pola pengawasan yang bersifat dua arah
2. Perlunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ilangata meningkatkan hubungan dengan mitra kerja organisasi yang bersahabat
3. Perlunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ilangata untuk mengawasi perkembangan semua kegiatan serta menggunakan pengarahan dengan , baik pada unit kerja yang dipimpinnya sehingga pekerjaan selesai dan tidak bermasalah.
4. perlunya mengoptimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ilangata dengan unit kerja yang dipimpinnya dengan cara menggunakan pola pengawasan yang bersifat dua arah, meningkatkan hubungan dengan mitra kerja organisasi yang lebih bersahabat, serta mengkoordinasikan perkembangan semua kegiatan dan menggunakan pengarahan dengan baik pada unit kerja yang dipimpinnya.

## PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan. Dalam hal ini penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyajian penelitian ini. Oleh karena itu penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tambahan dengan metode dan indikator penelitian yang lebih bervariasi, dan sistematis. Para peneliti lanjutan kiranya dapat Melaksanakan penelitian tentang pengawasan tentang BPD di desa Ilangata dengan perspektif yang berbeda dari sebelumnya agar dapat menjadi referensi penelitian yang bermanfaat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti penulis ingin menyampaikan rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. 1) Tim pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyusun penelitian ini. 2) Kepada seluruh aparatur desa selaku informan yang telah bersedia dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian. 3) Kepada kantor desa Ilangata yang telah memberikan izin serta akses untuk dapat melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 1994. *Kebijakan dan pembangunan*. Fia UNIBRAW. Malang.
- Ach. Wazirws. Et Al.Ed.1999, *Panduan Penguatan Manejeman Lembaga Swadaya Masyarakat Secretariat Bina Desa* Jakarta.
- A, Zarkasi, SH, MH. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Dessler. 2015. *Manejement Sumber Daya Manusia Suatu proses Memperoleh Kompensasi pada Karyawan*.

- Gomes. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi, Refisi, Andi. Yogyakarta.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harbani Pasalog, *Kepemimpinan Birokrasi*. Cet III, Bandung. Alfabeta CV. 2013.
- H. Hadari Nawawi, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Metode Sumber Daya Manusia Edisi Repisi*.
- Herujito (2011:216). *Proses Dimana Pimpinan Ingin Mengetahui Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilakukan Oleh Bawahannya*.
- Kaho R. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Karsada Jakarta.
- Irawan Soehartono. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2017. *Pengawasan Kepala Desa Dengan BPD dalam Pembangunan Fisik*.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung. PT Replika Aditama.
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Rosda Bandung*.
- Marwansyah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung.
- Masry. 2010. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maringin. 2011. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Gramedia.
- Mc Curdy. 2009. *Paradigm Administrasi Publik*. Cetakan 7. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Notoatmodjo, Soekodjo. 2010. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE.
- Panggaean, Mutiara S. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Putnam, Robert. 2010. *Social Capital*. Princeton University. Princeton.
- Siagian, P. Sondang. 2009. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik, Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Eresco.